Mahasiswa di Medan Blokir.....

Dari Halaman 1

intinya meminta pemerintah membatalkan UU TNI yang baru disahkan DPR RI.

Aksi mahasiswa dikawal puluhan personel polisi dibantu satpol PP dan sekuriti dewan. Di depan gerbang, polisi memasang pagar betis dengan menempatkan polwan di barisan depan. Massa juga menempatkan mahasiswi di barisan depan.

Lama tak ada ditemui anggota legislatif, massa akhirnya meningkatkan frekuensi aksi dengan memblokir jalan. Akibatnya arus lalulintas menjadi macet. Polisi mengalihkan arus lalulintas ke Jalan Raden Saleh.

Massa juga membakar beberapa ban bekas sepeda motor. Api menyala. Asap mengepul. Sementara mahasiswa menghidupkan musik keras dengan lagu "Bayar Polisi". Situasi aksi tetap berjalan damai. Polisi tetap memberikan pengamanan jalannya aksi. Satu jam aksi, tidak satupun anggota dewan datang menemui massa. (A-06)

Kibarkan Bendera Setengah Tiang .....

Dari Halaman 1

Mulanya aksi saling dorong sempat terjadi antara polisi dan massa. Mengutip dari detik-Kalimantan, massa aksi mendorong gerbang lewat pintu gerbang sisi kiri. Namun, tak bisa juga menembus, mereka berpindah ke gerbang gedung DPRD sisi kanan.

Akhirnya massa berhasil menerobos pagar dan masuk ke area gedung DPRD tersebut. Mereka lalu menurunkan bendera Merah Putih menjadi hanya terkibar setengah tiang pada Senin sore.

Koordinator aksi, Doni Miseri, mengatakan demonstrasi untuk mendesak perubahan UU TNI yang disahkan di Rapat Paripurna DPR pada pekan lalu dibatalkan.

Dalam aksinya, kata dia, massa ingin bertemu langsung dengan para anggota DPRD di dalam gedung wakil rakyat itu. Mereka menolak membacakan tuntutan di depan pintu gerbang.

"Kami menuntut agar pemerintah mempertimbangkan untuk mencabut UU TNI," ucapnya lantang di depan polisi dan massa lainnya.

Kronologi Penurunan Bendera Setengah Tiang

Saat berhasil masuk ke area DPRD, massa tak dibukakan pintu gedung. Akhirnya, peserta aksi berlari menuju tiang bendera yang berdiri di depan gedung DPRD.

Mereka menurunkan bendera setengah tiang, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kericuhan kembali terjadi saat mereka kembali berlarian mencoba menerobos pintu DPRD.

Selain di Palangkaraya, aksi tolak UU TNI terjadi di sejumlah kota di Indonesia dari wilayah barat hingga timur.

Aksi itu dipicu langkah pemerintah dan DPR yang mengebut perubahan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) jadi undang-undang dalam rapat paripurna di gedung wakil rakyat Indonesia, Jakarta, Kamis (20/3) lalu.

Pengesahan itu diwarnai demonstrasi di depan gedung DPR dan sejumlah kota di Indonesia sejak sehari sebelumnya.

Demonstrasi terjadi karena massa aksi menolak kebangkitan dwifungsi militer lewat RUU TNI itu. Salah satu tudingan atas wacana laten kebangkitan dwifungsi militer itu terletak pada pasal-pasal yang memperbolehkan prajurit berdinas di luar institusi pertahanan tersebut.

Selain di Palangkaraya, aksi tolak UU TNI pada hari ini juga di antaranya terjadi di Surabaya (Jawa Timur), Kupang (NTT), dan Tanjungpinang (Kepulauan Riau)**.(cnni/js)**

Surabaya Memanas .....

Dari Halaman 1

jubir massa aksi, Jaya, kepada wartawan di depan Gedung Negara Grahadi, dilansir detik-Jatim, Senin (24/3).

Massa aksi terus meneriakkan kekesalannya dengan menolak UU TNI di depan Gedung Negara Grahadi. Massa kemudian mulai membakar ban. Ada massa aksi yang melemparkan sepatu sebagai bentuk kekesalan ke arah ban yang dibakar.

Sementara itu, arus lalu lintas di depan Gedung Grahadi dialihkan ke Jalan Taman Apsari dan kawasan Simpang Dukuh.

Namun, perlahan situasi mulai memanas. Pantauan wartawan, tampak kawat berduri di depan Grahadi berusaha ditarik massa sekitar pukul 16.15 WIB, Senin (24/3).

Massa mulai melempar mercon dan batu. Polisi langsung menyemprot massa dengan air dari water cannon secara terus-menerus. Selama aksi, water cannon berjaga di sisi timur.

Lemparan Flare

Mereka seakan tidak gentar dan terus-terusan melempar benda-benda yang ada di depannya.

Selanjutnya, ada lemparan sejumlah flare dan molotov juga mengenai kawat berduri.

Sesaat setelah kejadian itu, massa langsung bersorak. Mereka juga mulai melakukan penyerangan dengan batu.

Tak hanya itu, mereka juga merusak pagar kawat berduri dan gapura yang berada di depan Grahadi**.(det/js)**

Di Malang, Massa Dipukul .....

Dari Halaman 1

Mereka membawa poster dan banner bernada protes bertuliskan 'Orback!', 'No UU TNI', 'Orda Paling Baru' dan 'Kembalikan militer ke barak'.

Aksi kemudian memanas setelah buka puasa sekitar pukul 18.15 WIB. Mereka mulai membakar beberapa barang di depan gerbang DPRD, mulai ban bekas, hingga seragam tentara.

Sekelompok orang yang belum teridentifikasi sebagai massa aksi kemudian melempar petasan dan molotov ke teras Gedung DPRD lantai satu serta dua. Api lantas langsung dipadamkan petugas pemadaman kebakaran yang sudah berjaga.

Belum ada keterangan dari pihak resmi siapa yang memulai pembakaran tersebut. Selain itu juga belum diketahui apakah sekelompok orang yang melempari molotov, batu dan kembang api itu adalah bagian dari massa aksi atau bukan.

Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah menyatakan bangunan yang terbakar ialah sebuah pos di sisi timur Gedung DPRD. Sementara api yang di teras dan lobi gedung utama berhasil dipadamkan.

"Yang terbakar itu sebelah kiri, pos tapi buat tempat-tempat berkas yang memang agak lumayan parah di sana," kata Rimzah.

Ia pun menyayangkan aksi pembakaran itu. Padahal menurutnya, anggota DPRD Malang siap untuk menemui massa aksi untuk audiensi.

"Prinsipnya kami 45 anggota dewan sudah mendapatkan arahan, bahwa 7 fraksi DPRD Kota Malang siap menerima audiensi, siap menerima aspirasi, dan siap membangun narasi bersama. Tapi sore hari ini tadi kami belum sempat menemui massa aksi, sudah chaos, dan berikut memang sedikit kami sayangkan," kata dia.

>>> Massa Aksi Ditangkap, Tim Medis & Jurnalis Dipukul

Sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil demonstran aksi Tolak UU TNI di DPRD Kota Malang dikabarkan ditangkap dan jadi korban kekerasan aparat, Minggu (23/3) malam.

Tim bantuan hukum LBH Pos Malang Wafdul Adif mengatakan, tak hanya massa aksi, tim medis dan jurnalis juga jadi sasaran.

"Sejumlah massa aksi ditangkap, dipukul dan mendapatkan ancaman. Tim medis, pers dan pendamping hukum yang bersiaga juga mendapati pemukulan," kata Wafdul, Senin (24/3).

Tak hanya itu, sejumlah gawai massa aksi dan tim medis dirampas, begitu pula dengan alat kelengkapan medis. Selain pemukulan, massa juga mengalami kekerasan seksual dan ancaman pembunuhan verbal.

"Jumlah massa aksi yang tertangkap dan berhasil diidentifikasi identitasnya sekitar enam orang," ucapnya.

Sedangkan jumlah massa aksi yang hilang kontak sebanyak 8-10 orang. Lalu, yang dilarikan ke rumah sakit 6-7 orang. Mereka tersebar di sejumlah rumah sakit.

"Jumlah massa aksi, tim medis, dan pers yang terluka estimasi puluhan," ucapnya.

"Massa aksi yang dirawat tersebar di sejumlah rumah sakit. Terjadi sweeping di sekitar rumah sakit dan kafe," tambahnya.

Selain itu, ada belasan kendaraan bermotor milik massa aksi diamankan ke Polresta Malang Kota. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian perihal kejadian tersebut**. (det/js)**

Warga Palestina .....

Dari Halaman 1

sejak Oktober 2023 menjadi 50.021.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban yang meninggal dunia pada Ahad itu termasuk dua jasad yang ditemukan dari reruntuhan dalam 24 jam terakhir.

Kementerian itu mengatakan 61 warga yang terluka telah dibawa ke rumah sakit, sehingga jumlah korban luka selama agresi militer Israel menjadi 113.274 orang.

"Banyak korban masih terjebak di bawah reruntuhan dan tergeletak di jalan karena tim penyelamat tidak bisa menjangkau mereka," kata kementerian.

Sejak Israel melanjutkan serangannya pada 18 Maret, lebih dari 700 warga Palestina telah wafat dan lebih dari 1.200 lainnya terluka.

Serangan mendadak itu menghancurkan kesepakatan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tawanan yang berlaku pada Januari.

November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di wilayah kantong Palestina itu**. (rep/js)**

Refleksi, Pemurnian, dan Regenerasi Diri .....

Dari Halaman 1

Idul Fitri juga merupakan waktu untuk pemurnian hati, sebuah konsep yang berakar pada gagasan fitrah dalam Islam. Fitrah merujuk pada keadaan alami manusia yang suci dan bersih, sebagaimana diciptakan oleh Tuhan.

Ramadan, dengan segala ibadah dan amalan yang dilakukan, adalah sarana untuk mengembalikan manusia ke keadaan fitrah tersebut. Ghazali, dalam Ihya Ulumuddin, menekankan pentingnya membersihkan hati dari penyakitpenyakit spiritual seperti riya, takabur, dan hasad.

Pemurnian hati melibatkan introspeksi diri, taubat, dan peningkatan kualitas ibadah. Idul Fitri adalah puncak dari proses pembersihan diri ini, di mana individu diharapkan dapat mempertahankan kesucian hati yang telah dicapai selama Ramadan.

Transformasi Spiritual dan Sosial Idul Fitri bukan hanya akhir dari Ramadan, tetapi juga awal dari kehidupan baru. Setelah sebulan penuh berlatih menahan diri dan meningkatkan ketakwaan, individu diharapkan dapat mempertahankan semangat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Idul Fitri menjadi momentum untuk memulai lembaran baru, dengan tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam konteks sosial, Idul Fitri memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas antarumat Muslim.

Tradisi silaturahmi dan saling memaafkan menciptakan harmoni dan kedamaian dalam masyarakat. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan umat.

Kesimpulan

Idul Fitri 1446 H adalah momentum krusial untuk refleksi diri, pemurnian hati, dan regenerasi spiritual. Tradisi saling memaafkan, yang berakar pada ajaran Islam dan didukung oleh temuan psikologi, memiliki signifikansi mendalam dalam proses ini. Dengan memaafkan, membersihkan hati, dan menjalani hidup yang baru, umat Muslim dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan sosial yang lebih baik.(*)

Lebaran Muhammadiyah .....

Dari Halaman 1

Jakarta Pusat, barubaru ini.

Nasaruddin menuturkan, penentuan 1 Syawal 1446 H/2025 Masehi menunggu sidang isbat yang digelar pada 29 Maret mendatang. Pemantauan hilal dilakukan di sejumlah titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Karena ijtimaknya itu tanggal 29 juga itu sekitar sore ya, kemudian juga diharapkan para peruyah, baik dari Ormas Islam maupun Kementerian Agama sudah menyebar di seluruh Indonesia pada tanggal 29," tuturnya.

Nasarudin mengatakan saat ini kondisi hilal masih jauh dari standar. Dia mengaku hilal masih berada di bawah 0 derajat, tepatnya masih minus 3 derajat.

"Kemudian juga elongasinya juga masih sangat rendah, belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Mahfiz, yaitu ketinggian Hilal 3 derajat dan elongasinya sekitar 6 derajat," ujar Nasaruddin.

Nasaruddin kemudian menyebut Muhammadiyah sudah memutuskan 1 Syawal 1446 H jatuh pada 31 Maret. Hal ini berdasarkan perhitungan hisab.

"Dari segi ilmu hisab, Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa ini stigma lah, artinya dicukupkan 30 hari bulan Suci Ramadan, dan dengan demikian lebarannya tanggal 31," paparnya.

Namun dia kembali menegaskan kepastian lebaran Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 menunggu sidang isbat.

"Tapi kepastiannya itu nanti menunggu sidang isbat pada tanggal 29 itu. Insyaallah. Saya kira itu," pungkas Nasaruddin**.(det/js)**

2.575 Aparat .....

Dari Halaman 1

Ary Syam Indradi dalam keterangannya, Senin (24/3).

Terkait rekayasa lalu lintas di sekitar GBK, kata Ade Ary, masih bersifat situasional. Kendati demikian, ia meminta masyarakat untuk mencari jalan alternatif demi menghindari kemacetan.

"Kami akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional dilihat dari situasi perkembangan di lapangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ade Ary turut mengimbau kepada para penonton untuk tidak membawa benda atau barang berbahaya ke dalam area stadion.

Ia menyampaikan petugas yang ada di lapangan akan melakukan pengecekan terhadap barang bawaan yang dibawa penonton sebelum masuk ke dalam stadion.

"Kami ada melakukan pengamanan secara terbuka dan tertutup. Tertutup artinya ada petugas kepolisian yang anuniform police ya, berpakaian preman ya, tidak menggunakan seragam dinas kepolisian, ada ya," tutur Ade Ary.

"Jadi mohon kerja samanya, semoga besok pertandingan terlaksana dengan aman dan kita doakan Indonesia menang kita optimis," imbuhnya.

Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga kedelapan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini penting bagi Indonesia dan Bahrain. Sebab keduanya sama-sama masih punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026.

Saat ini Indonesia menempati peringkat keempat Grup C dengan enam poin, di bawah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Di bawah Indonesia ada Bahrain dan China, juga dengan enam poin.

Laju perolehan poin Indonesia sementara tertahan karena kalah 1-5 dari Australia pada Kamis (20/3) lalu. Situasi serupa juga dialami Bahrain yang kalah 0-2 lawan Jepang.

Karenanya, kemenangan adalah ambisi yang harus diwujudkan oleh tim besutan Patrick Kluivert. Tiga poin akan menjaga asa Indonesia menuju panggung dunia. **(cnni/js)**

Masyarakat Khawatir

Dari Halaman 1

eskalasi ketegangan antara pemerintah dan masyarakat meningkat, yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik.

Pemerintah sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat dengan membuka dialog konstruktif untuk mencapai solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, guna menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.

Demonstrasi adalah bentuk partisipasi politik non-elektoral. Menurut teori ini, aksi unjuk rasa dilakukan ketika masyarakat merasa bahwa jalur formal seperti pemilu atau lobi politik tidak cukup efektif dalam menyuarakan aspirasi mereka. Samuel P. Huntington berpendapat bahwa partisipasi politik yang tinggi tanpa institusi politik yang mampu mengakomodasi tuntutan masyarakat dapat menimbulkan ketidakstabilan.

Sidney Tarrow dalam teori contentious politics menyebut aksi kolektif seperti demo sebagai bentuk mobilisasi yang muncul ketika kelompok merasa ada ketidakadilan dan mereka memiliki peluang untuk menuntut perubahan.

Menurut teori Agenda-Setting, media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan agenda politik. Jika isu demonstrasi mendapatkan perhatian luas di media, maka pemerintah cenderung memberikan respons lebih cepat.

McCombs & Shaw menyebut bahwa media tidak selalu menentukan bagaimana orang berpikir, tetapi mereka dapat menentukan apa yang orang pikirkan. Jika demo menolak UU TNI terus diberitakan, tekanan terhadap pemerintah akan semakin besar.

Elisabeth Noelle-Neumann dalam teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung diam jika mereka merasa pendapatnya minoritas. Sebaliknya, ketika semakin banyak orang berbicara dan turun ke jalan, semakin besar keberanian orang lain untuk ikut serta. Dalam konteks demo ini, semakin banyak daerah yang ikut aksi, semakin besar tekanan politik terhadap pemerintah.

Noam Chomsky dalam Manufacturing Consent menyatakan bahwa pemerintah sering menggunakan media untuk membentuk opini publik agar mendukung kebijakan mereka. Jika media justru menyoroti pelanggaran hak demonstran atau represivitas aparat, maka narasi pemerintah bisa melemah.

Antonio Gramsci menjelaskan bahwa aksi demonstrasi dapat menjadi tantangan terhadap hegemoni negara, terutama jika terjadi ketimpangan kekuasaan yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam komunikasi politik, demonstrasi bisa menjadi indikator krisis legitimasi. Jika pemerintah tidak mampu mengelola komunikasi secara efektif, eskalasi protes bisa semakin besar. Respons pemerintah—apakah memilih dialog, kompromi, atau represi—akan menentukan dinamika politik ke depan.